GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN

Surat Kabar : **Kompas** **Tanggal** : **1 Februari 2007**

Subyek : **Habitat Gajah** **Hari** : **kamis**

Halaman : **13**

Habitat Gajah Terancam

Dua Lahan Bekas HPH di Riau dan Jambi Akan Dilelang

Jakarta, Kompas - Habitat gajah dan harimau sumatera yang merupakan satwa endemik Sumatera terancam, menyusul rencana pelelangan dua konsesi bekas hak pengusahaan hutan di Riau dan Jambi. Hutan alam seluas sekitar 130.000 hektar itu berada di atas lahan konsesi yang akan dilelang menjadi kawasan hutan tanaman industri tersebut.

Data yang dilansir koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Eyes on the Forest (EoF) menunjukkan, sebanyak 60-70 ekor gajah dan 100 ekor harimau berada di kawasan yang akan dilelang.

"Pelelangan hutan produksi itu kian mempercepat kepunahan gajah dan harimau," kata Koordinator EoF Nursamsu ketika dihubungi di Riau, Rabu (31/1).

Di seluruh Sumatera, populasi gajah diperkirakan kurang dari 700 ekor, sedangkan populasi harimau di bawah angka perkiraan itu. Perburuan liar menjadi persoalan serius yang masih berlangsung hingga kini.

Pelelangan hutan yang berdampak pada fragmentasi lahan hutan alam dikhawatirkan memperparah ancaman itu. Demikian juga karakter monokultur pada hutan tanaman industri (HTI).

Akibat lain yang sudah terjadi, habitat gajah dan harimau yang menyempit sangat berpotensi menimbulkan konflik dengan manusia. Konflik yang belum terpecahkan hingga kini, dikhawatirkan terus bertambah. "Kami berupaya agar hutan produksi itu tidak dilelang jadi HTI, tetapi menjadi kawasan perluasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh," katanya.

Kepala Balai Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) Haryono berharap lahan yang akan dijadikan perluasan TNBT itu tidak diikutsertakan dalam pelelangan. "Lahan yang akan dijadikan area perluasan TNBT sudah disetujui Departemen Kehutanan agar tidak ikut dilelang. Luas area yang direncanakan untuk perluasan sekitar 86.000 hektar," katanya.

Hutan Bukit Tigapuluh merupakan salah satu blok hutan terbesar yang tersisa dengan luas 413.000 hektar. Hutan itu masuk dalam dua provinsi, Riau dan Jambi.

Bertolak belakang

Menurut EoF, rencana pelelangan hutan produksi itu justru bertentangan dengan rencana pemerintah merestorasi lahan kritis seluas 2 juta hektar tahun 2007 ini.

Rencana pemerintah itu dinilai sebagai tindakan nyata mendukung deforestasi. "Jika ada pilihan lebih murah dan mudah untuk menambah hutan, kenapa tidak memilih cara itu?" kata Koordinator Jikalahari, Zulfahmi, dalam siaran pers EoF.

.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2000, lanjutnya, pembangunan HTI tidak diberikan izin untuk hutan alam, tetapi untuk alang-alang, tanah kosong, dan semak belukar di hutan produksi.

Nantinya, jatuhnya lahan hutan produksi menjadi HTI ke tangan investor dipastikan berujung pada maraknya penebangan massal dan berganti pada jenis tanaman monokultur.

Menurut Haryono, perluasan lahan bekas TNBT sebenarnya sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jambi, seluas 73.000 hektar. Tinggallah Pemerintah Provinsi Riau yang belum menetapkan perluasan lahan di wilayah Riau seluas 13.000 hektar.

Sedangkan rencana perluasan lahan HTI akan memotong TNBT dengan Hutan Lindung Bukit Batabuh yang bakal mengganggu ekosistem hutan lindung itu.

Haryono menambahkan, perluasan HTI yang akan diikuti dengan penanaman akasia akan mengganggu ekosistem tanaman di taman nasional. Alasannya, tanaman akasia bersifat ekspansif dan akan menyebarkan biji ke berbagai wilayah. Padahal, tanaman ini tidak cukup baik menjaga lingkungan.

Wilayah di sekitar taman nasional itu saat ini menjadi penghidupan suku asli, yaitu suku Talang Mamak dan suku Anak Dalam, Jambi. Mereka tidak tinggal di dalam hutan, tetapi di sekitarnya, dan masyarakat setempat mempunyai tradisi menjaga lingkungan. (ART/GSA)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup